

RINGKASAN EKSEKUTIF
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes –
Jambi Sustainable Landscape Management Project
(BioCF ISFL – JSLMP)

Inisiatif Dana Biokarbon untuk bentang alam Hutan Berkelanjutan (BioCF -ISFL) adalah dana multilateral yang didukung oleh pemerintah donor dan dikelola oleh Bank Dunia. Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, deforestasi, dan degradasi hutan di negara berkembang (REDD+) dengan output perencanaan dan kebijakan pertanian berkelanjutan serta praktik penggunaan lahan yang lebih inovatif.

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan program penurunan emisi pada Provinsi Jambi yang berfokus pada pendekatan lanskap. Provinsi Jambi saat ini sedang diusulkan untuk pembiayaan di bawah Inisiatif Dana Biokarbon melalui Lanskap Hutan Berkelanjutan Terpadu (ISFL). Program Penurunan Emisi (ERP) terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan Perbaikan Tata Kelola Lahan/Hutan; (2) Implementasi Pengelolaan Lahan Berkelanjutan; (3) Manajemen dan Koordinasi Proyek. Program ini juga mengadopsi 10 Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia sebagai Penyedia Dana. Sebagaimana dipersyaratkan dalam ESS10 tentang pelibatan pemangku kepentingan dan Keterbukaan Informasi, Unit Pengelola Proyek Sub Nasional Provinsi Jambi telah menyiapkan Dokumen Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) sebagai salah satu instrumen pendukung Safeguard.

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) dikembangkan untuk mempromosikan partisipasi pemangku kepentingan yang terkena dampak dan berkepentingan, serta untuk memastikan proses konsultatif, transparan, dan partisipatif dalam desain dan implementasi Program ER (*Emission Reduction*), termasuk implementasi BSP dan FGRM. SEP menjabarkan prinsip-prinsip utama dalam melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, pendekatan pelibatan, strategi komunikasi, pengaturan kelembagaan, dan tanggung jawab pemantauan dan pelaporan.

Program ER disusun melalui proses konsultatif dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, sub nasional dan daerah, termasuk dengan masyarakat melalui kegiatan musyawarah desa. SEP telah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan pada tingkat yang berbeda. Identifikasi ini kemudian digunakan untuk pengembangan metode komunikasi dan keterlibatan yang tepat dan dapat diakses selama proses pelaksanaan proyek dan distribusi manfaat. Identifikasi pemangku kepentingan secara umum dapat dikategorikan sebagai lembaga pemerintah, masyarakat yang terkena dampak dan pihak yang berkepentingan. Proses pelibatan awal dengan pemangku kepentingan telah dimulai sebagai bagian dari persiapan proyek. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut terutama berfokus pada pengembangan desain proyek dan komponennya dengan pemerintah nasional dan sub-nasional terkait dalam menentukan kerangka kerja, peran, dan tanggung jawab yang dihasilkan. Setidaknya sudah ada tujuh proses pelibatan pemangku kepentingan baik pada level nasional maupun local dari tahun 2021 hingga 2022. Tentunya proses pelibatan ini memperhatikan protokol kesehatan karena dilakukan pada masa pandemic Covid-19.

Selama pelaksanaan Program ER, jenis informasi yang akan diungkapkan dan masing-masing metode yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi antara lain: a) melalui website KLHK dan Pemerintah Provinsi Jambi; b) rapat koordinasi pemangku kepentingan; c) konsultasi publik; dan d) diseminasi ringkasan kebijakan yang relevan. Proses FGRM telah dijalankan di tingkat nasional dan sub-nasional. Dalam program ERP J-SLMP, FGRM akan memiliki dua metode di tingkat daerah; pertama, pelapor dapat menyampaikan pengaduan langsung ke instansi yang berwenang (OPD) di setiap tingkat, atau dapat difasilitasi oleh tim *safeguards* yang akan memastikan pengaduan yang dilaporkan sampai ke instansi resmi terkait. Kedua, pengaduan dapat disampaikan melalui website SP4N LAPOR Provinsi Jambi <https://www.lapor.go.id/>. Proyek Hasil Pengurangan Emisi Jambi (JERR) yang akan datang telah dirancang untuk meningkatkan dan mendorong upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK di Jambi. JERR akan melengkapi rangkaian intervensi yang ada dengan menyediakan pembayaran berbasis hasil hingga US\$70 juta melalui Perjanjian Pembayaran berbasis Penurunan Emisi (ERPA).

Selanjutnya SEP akan melanjutkan proses pelibatan pemangku kepentingan melalui beberapa pendekatan antara lain: (1) konsultasi dan partisipasi komunitas dalam implementasi proyek; (2) mekanisme FGRM yang transparan; (3) meningkatkan jangkauan komunikasi, kampanye publik dan pengembangan kapasitas; dan (4) pengembangan proses manajemen resiko dan keterlibatan yang memenuhi ESF Bank Dunia. Beberapa aktivitas pelibatan pemangku kepentingan seperti konsultasi publik, workshop, dan sosialisasi akan dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, and transparan.